



RENJA RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2024



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2024**

Jln. A. Yani No.76 Muara Teweh Provinsi Kalimantan Tengah 73812
Email : bpbdbarut2013@gmail.com tlp : 0821 – 5485 – 2915

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 telah kami susun.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perubahan yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan hasil evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun lalu.

Penyusunan RENJA Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 mengacu pada arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024. RENJA disusun dengan terlebih dahulu melakukan kajian terhadap kondisi eksisting Badan Penanggulangan Bencana Daerah, evaluasi pelaksanaan RENJA Perubahan Tahun berjalan serta pertimbangan kebutuhan tahun 2024. Harapan kami, RENJA Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara sehingga dapat menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Barito Utara.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 ini disusun untuk dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Muara Teweh, 07 Oktober 2024

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA**



SIMAMORATURAHMAN, SE, MS

Pembina (IV/a)

NIP. 10740922 199603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	31
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	32
3.3 Program dan Kegiatan	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	35
BAB V PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada pasal 25, dibentuklah Badan Nasional Peanggulangan Bencana (BNPB). Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun ini menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya perubahan program dan kegiatan yang ada dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 serta RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023.

Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun ini diantaranya, tidak terlepas dari segi pendanaan untuk Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2024, sehingga diperlukan kebijakan dalam anggaran agar Rencana Kerja yang disusun tersebut dapat dilaksanakan secara optimal.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara ini disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 496);
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonomi Baru;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 80);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);
30. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 40).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan BPBD Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang prioritas pembangunan dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah konkrit kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini adalah untuk mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana di amanatkan pada Undang – Undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Selain hal tersebut hasil / keluaran penyusunan rencana kerja ini adalah untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan BPBD Kabupaten Barito Utara serta sumber pembiayaannya yang digunakan pada tahun Anggaran 2024.

Selain hal tersebut diatas, tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Memberikan landasan operasional bagi BPBD Kabupaten Barito Utara dalam menyusun Rencana Kegiatan Perubahan tahun 2024;
2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2024;
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
4. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan tahun 2024.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan unit kerja perlu ditetapkan program tahunan, yaitu sebagaimana tersebut yang dituangkan dalam rencana kerja Perubahan BPBD tahun 2024.

Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja diatas tidak dapat dilaksanakan melalui suatu kegiatan yang bersamaan, tetapi harus melalui tahapan yang berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut yang menjadi sarana prioritas adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Untuk penyusunan Renja perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024.

Pada tahun 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2023 sejumlah Rp. 22,114,105,636. Dalam pelaksanaannya, program, kegiatan dan subkegiatan tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/ 100 persen dengan realisasi anggaran Rp 18,901,502,364 atau sebesar 85,47 % persen.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran / hasil

dari kegiatan / program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Adapun hasil evaluasi terhadap target dan realisasi capaian indikator kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)

PD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja RENSTRA PD pada Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target / Program Kegiatan RENJA PD Tahun Berjalan Tahun 2024 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target RENJA PD Tahun 2023 (Tahun n-2)	Realisasi RENJA PD Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) /2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terwujudnya penyusunan RKA Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	6 dok	100%
2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terwujudnya penyusunan RKA Perubahan Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	6 dok	100%
2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terwujudnya penyusunan DPA Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	6 dok	100%
2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terwujudnya penyusunan Perubahan DPA Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	6 dok	100%
2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Terwujudnya penyusunan laporan realisasi capaian	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	3 Lap	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja RENSTRA PD pada Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target / Program Kegiatan RENJA PD Tahun Berjalan Tahun 2024 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target RENJA PD Tahun 2023 (Tahun n-2)	Realisasi RENJA PD Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) /2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	kinerja								
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya Gaji dan Tunjangan ASN	36 Org	36 Org	36 Org	36 Org	100%	36 Org	108 Org	100%
2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	36 dok	100%
2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100,00%	1 dok	3 dok	100%
2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Terwujudnya penyusunan laporan keuangan semesteran	18 dok	18 dok	18 dok	18 dok	100,00%	18 dok	54 dok	100%
2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terwujudnya penyusunan laporan pronogsis relisasi anggaran	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100,00%	1 dok	3 dok	100%
2.05	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	0%	100%	100%	100,00%	100%	100%	0%
2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terwujudnya Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36 Org	36 Org	36 Org	36 Org	100%	36 Org	108 Org	100%
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan gedung kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	3 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja RENSTRA PD pada Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target / Program Kegiatan RENJA PD Tahun Berjalan Tahun 2024 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target RENJA PD Tahun 2023 (Tahun n-2)	Realisasi RENJA PD Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) /2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100,00%	5 Paket	15 Paket	100%
2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya penyediaan logistik kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	3 Paket	100%
2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	100,00%	1 Thn	1 tahun	100%
2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	100,00%	1 Thn	1 tahun	100%
2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	100,00%	1 Thn	1 tahun	100%
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	70%	70,00%	100%	100%	100%
2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya penyediaan jasa administrasi perkantoran	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	100,00%	1 Thn	1 tahun	100%
2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	100,00%	1 Thn	1 tahun	100%
2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya jasa non PNS	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	100,00%	1 Thn	1 tahun	100%
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	100,00%	1 Thn	1 tahun	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja RENSTRA PD pada Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target / Program Kegiatan RENJA PD Tahun Berjalan Tahun 2024 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target RENJA PD Tahun 2023 (Tahun n-2)	Realisasi RENJA PD Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) /2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Terlaksananya Kegiatan di 9 (sembilan) Kecamatan yang Terlayani	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	100,00%	1 Thn	1 tahun	100%
2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100%	91%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Rencana Penanggulangan Bencana	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	1 kegiatan	3 kegiatan	100%
2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pengendalian Operasi terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	100,00%	1 Thn	1 Thn	100%
2.02.07	Penanganan Pasca Bencana	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	100,00%	1 Thn	1 tahun	100%
2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana	Terlaksananya Penanganan Darurat Bencana	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	100,00%	1 Thn	1 tahun	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja RENSTRA PD pada Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target / Program Kegiatan RENJA PD Tahun Berjalan Tahun 2024 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target RENJA PD Tahun 2023 (Tahun n-2)	Realisasi RENJA PD Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) /2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksanannya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	100,00%	1 Thn	1 tahun	100%
2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Logistik Untuk Korban Bencana	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	100,00%	1 Thn	1 tahun	100%
2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Terlaksanannya Sistem Informasi Kebencanaan	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	100,00%	1 Thn	1 tahun	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pada tahun 2024 terdapat 3 (tiga) Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dilaksanakan, untuk capaian kinerja tahun 2023 yaitu :

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana mencapai 70,86%
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana mencapai 73,36%
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana mencapai 100%

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Persentase Desa Tangguh Bencana mencapai 61,17%.
2. Persentase Unsur Penanggulangan Bencana dan Kebakaran mencapai 100 %
3. Persentase Peralatan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran mencapai 100 %
4. Persentase Logistik mencapai 100%.

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat bahwa capaian kinerja program-program pokok dalam bentuk indikator hasil (*outcome*) yang terealisasi melalui kegiatan-kegiatan di masing-masing program tersebut adalah sebagaimana Tabel 2.2 dan Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan SPM BPBD

PD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun Anggaran 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n +1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun Anggaran 2024 (thn n)	Tahun Anggaran 2025 (thn n +1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	88%	75,23%	100%	100%	
2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	77,06%	100%	100%	
3		Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	84%	99.06%	100%	100%	

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan IKU BPBD

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun Anggaran 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n +1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun Anggaran 2024 (thn n)	Tahun Anggaran 2025 (thn n +1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Desa Tangguh Bencana			71%	85%	56%	71%	71%	61,17%	56%	71%	
2	Persentase Unsur Penanggulangan Bencana dan Kebakaran			86%	90%	76%	86%	86%	100%	76%	86%	
3	Persentase Peralatan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran			85%	95%	75%	85%	85%	100%	75%	85%	
4	Persentase Logistik Penanggulangan Bencana dan Kebakaran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Indeks Resiko Bencana (IRB)			-	-	-	112,5	-	-	-	112,5	
6	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)			-	-	-	0,5	-	-	-	0,5	

Pada tahun 2025 Indikator Kinerja Utama BPBD mengalami perubahan dari 4 Indikator Kinerja Utama menjadi 2 Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Resiko Bencana (IRB) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di karenakan mengikuti Renstra BPBD terbaru

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki kedudukan sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang penanggulangan bencana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
8. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara adalah:

- a. Belum Optimalnya Kesadaran Masyarakat Tentang Kepedulian Terhadap Bencana;
- b. Belum Optimalnya Pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Belum Optimalnya Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Kegiatan penanggulangan bencana masih belum berorientasi pada mitigasi bencana: identifikasi, kajian dan pemantauan risiko bencana serta penetapan sistem peringatan dini yang masih kurang.
- e. belum terintegrasinya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan, membangun sistem penanggulangan bencana yang handal melalui kelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadai dan membangun masyarakat yang tangguh/tahan dalam menghadapi bencana;
- f. Desa tangguh bencana yang telah terbentuk belum seluruhnya memenuhi kriteria utama, hal ini mengakibatkan kejadian bencana masih menimbulkan resiko yang tinggi;
- g. kelembagaan penanggulangan bencana yang belum optimal menjadi persoalan tersendiri terutama dalam hal pemenuhan sarana prasarana penanggulangan bencana seperti peringatan dini, dan peralatan penanganan bencana.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan BPBD Kabupaten Barito Utara. Tantangan yang harus dihadapi adalah mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif yaitu manajemen risiko bencana. Paradigma baru ini perlu disosialisasikan agar terdapat pemaduan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan program pembangunan sehingga terbangun mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif dan efisien.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai berikut

1. Peningkatan ketahanan bencana; Pengkajian dan Pemantauan Risiko Bencana serta Pengembangan system Peringatan Dini;
2. Menjadikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagai prioritas daerah yang dilaksanakan melalui kelembagaan yang kuat;
3. Menyiapkan Desa Tangguh Bencana yang memenuhi kriteria utama di daerah rawan bencana;
4. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
5. Sosialisasi tanggap bencana dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat;
6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
7. Memberikan perlindungan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
8. Menyusun fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputi pembangunan kembali prasarana dan fasilitas masyarakat;
9. Pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pasca bencana;
10. Penerapan manajemen kinerja yang memfokuskan pelaksanaan tugas dan fungsi harus memberikan hasil demi terwujudnya tujuan organisasi yang akhirnya dapat bermanfaat bagi publik/masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah (PD) dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah (PD), dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan. Dari analisis kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara dengan Rancangan Awal RKPD, mengusulkan 3 Program 15 Kegiatan dengan 42 Sub Kegiatan. Secara rinci dijabarkan sebagaimana Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2024

PD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator/ Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Keteriban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				18.364.762.000	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Keteriban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				18.364.762.000	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100%	13.830.010.875	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100%	13.830.010.875	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	91.495.600	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	91.495.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Muara Teweh	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	25.002.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Muara Teweh	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	25.002.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Muara Teweh	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	24.970.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Muara Teweh	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	24.970.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Muara Teweh	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6.501.600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Muara Teweh	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6.501.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Muara Teweh	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	25.023.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Muara Teweh	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	25.023.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muara Teweh	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	9.999.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muara Teweh	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	9.999.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator/ Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	4.790.506.643	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	4.790.506.643	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Teweh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	4.538.250.043	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Teweh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	4.538.250.043	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Muara Teweh	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	231.480.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Muara Teweh	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	231.480.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muara Teweh	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.811.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muara Teweh	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.811.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Muara Teweh	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	6.516.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Muara Teweh	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	6.516.600	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Muara Teweh	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.449.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Muara Teweh	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.449.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100%	251.406.350	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100%	251.406.350	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	101.406.500	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	101.406.500	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	149.999.850	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	149.999.850	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	407.210.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	407.210.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	207.210.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	207.210.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator/ Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	200.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	200.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	486.936.650	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	486.936.650	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	50.016.650	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	50.016.650	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	85.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	85.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	60.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	60.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	241.920.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	241.920.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	950.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	950.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Teweh	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.490.510.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Teweh	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	3.490.510.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	2.955.103.632	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	2.955.103.632	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muara Teweh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muara Teweh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muara Teweh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	563.180.132	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muara Teweh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	563.180.132	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muara Teweh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.379.923.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muara Teweh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.379.923.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator/ Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	1.047.498.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	1.047.498.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Teweh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	847.370.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Teweh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	847.370.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Muara Teweh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	3 Unit	200.128.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Muara Teweh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	3 Unit	200.128.000	
	Penataan Organisasi			100%	109.344.000	Penataan Organisasi			100%	109.344.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Muara Teweh	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	109.344.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Muara Teweh	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	109.344.000	
2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				4.672.965.725	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				4.672.965.725	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana			100%	553.999.725	Pelayanan Informasi Rawan Bencana			100%	553.999.725	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Muara Teweh	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	2500 Orang	553.999.725	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Muara Teweh	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	2500 Orang	553.999.725	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			100%	1.508.732.650	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			100%	1.508.732.650	
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang	200 Kegiatan	100.000.000	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang	200 Kegiatan	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator/ Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			tertangani					tertangani			
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Laporan	1.167.732.650	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Laporan	1.167.732.650	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	82.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	82.000.000	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	27 Kawasan	159.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	27 Kawasan	159.000.000	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			100%	1.800.264.200	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			100%	1.800.264.200	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	295.269.675	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	295.269.675	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	65.761.750	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	65.761.750	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan	392 Orang	299.171.875	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban		Jumlah Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	392 Orang	299.171.875	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator/ Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Bencana Kabupaten/Kota		Evakuasi Korban Bencana			Bencana Kabupaten/Kota					
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2 Laporan	1.140.060.900	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Jumlah Posko Aktivasi Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan	1.140.060.900	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			100%	809.969.150	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			100%	809.969.150	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	2 Dokumen	204.999.500	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	2 Dokumen	204.999.500	
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	383.000.000	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	383.000.000	
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	221.969.650	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	221.969.650	
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				585.140.000	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				585.140.000	
	Investigasi Kejadian Kebakaran			100%	61.785.400	Investigasi Kejadian Kebakaran			100%	61.785.400	
	Investigasi Kejadian Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi	100 Dokumen	61.785.400	Investigasi Kejadian Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi	100 Dokumen	61.785.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator/ Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Penelitian dan Pengujian					Penelitian dan Pengujian			
	Jumlah				18.364.762.000	Jumlah				17.742.165.571	

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah merupakan usulan prioritas yang bersumber dari hasil pengumpulan informasi baik usulan para pemangku kepentingan, kelompok masyarakat dan/atau melalui pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Barito Utara, juga dari hasil penelitian lapangan di Desa – Desa dan pengamatan pelaksanaan Musrembang pada tahun sebelumnya. Dari usulan kegiatan yang menjadi sorotan dan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Barito Utara adalah secara bertahap telah melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan prioritas pada aspek pra bencana sebagaimana paradigma pengurangan risiko bencana, yaitu dengan menekankan pada upaya-upaya pada saat tidak terjadi bencana ataupun terdapat potensi terjadi bencana.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dikaitkan dengan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan nasional, maka tugas dan fungsi BPBD termasuk dalam bidang Penyelenggaraan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) dan Penanggulangan Bencana.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2044, Kebijakan penanggulangan bencana tahun 2020 – 2044 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.
6. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Renja Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026.

Mengacu pada tujuan pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu Mewujudkan ketentraman dan ketertiban pada masyarakat

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah tersebut ditetapkan sasaran pokok pembangunan daerah yang menitik beratkan pada sasaran yaitu Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Penanganan Konflik dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan politik.

Adapun Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara untuk Tahun 2024 yaitu “Pengurangan Risiko Bencana” dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara adalah:

1. Meningkatnya Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana
2. Tercukupinya Kebutuhan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran di Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Barito Utara menetapkan 3 Program 14 Kegiatan dengan 39 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Keteriban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1)	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3)	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
5)	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
9)	Penataan Organisasi

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

2 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana

2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota

Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota

**3 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**

1) Investigasi Kejadian Kebakaran

Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input, process, outputs, outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dituangkan dalam tabel 4.1 Berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO UTARA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRITA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENIA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024				Bertambah/Berkurang (10-12)	13	14	15	16	17			18	19		20	21	
							SEBELUM	SEDUJAH	RKPD 2024	APBD 2024														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																								
1		URUSAN PEMERINTAHAN WALIS YANG BERKAITAN DEKATAN PELAYANAN DASAR							19.579.394.039.00	17.444.770.000.00	18.364.762.000.00	-1.214.632.039.00							20.260.688.000.00					
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTERAPAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							19.579.394.039.00	17.444.770.000.00	18.364.762.000.00	-1.214.632.039.00							20.260.688.000.00					
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang diaksanakan				-	100 %	12.062.000.000.00	12.710.018.875.00	13.630.010.875.00	951.000.000.00							13.013.000.000.00					
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja				-	100 %	35.000.000.00	91.495.600.00	91.495.600.00	56.495.600.00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik	-		37.500.000.00	BADAN PENANGGU LANGKAN BENCANA DAERAH				
1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000.00	25.002.000.00	25.002.000.00	20.002.000.00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik			5.500.000.00	BADAN PENANGGU LANGKAN BENCANA DAERAH				
1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																								
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.500.000.00	24.970.000.00	24.970.000.00	18.470.000.00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik			7.000.000.00	BADAN PENANGGU LANGKAN BENCANA DAERAH				
1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.500.000.00	6.501.600.00	6.501.600.00	1.600.00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik			7.000.000.00	BADAN PENANGGU LANGKAN BENCANA DAERAH				
1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD																								
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.500.000.00	25.023.000.00	25.023.000.00	18.523.000.00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik			7.000.000.00	BADAN PENANGGU LANGKAN BENCANA DAERAH				
1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD																								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.500.000.00	9.999.000.00	9.999.000.00	-501.000.00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik			11.000.000.00	BADAN PENANGGU LANGKAN BENCANA DAERAH				
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertelaksananya Administrasi Keuangan				-	100 %	3.717.000.000.00	4.125.506.643.00	4.790.506.643.00	1.073.506.643.00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik	-		4.254.000.000.00	BADAN PENANGGU LANGKAN BENCANA DAERAH				
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/b- ulan	22 Orang/b- ulan	3.500.000.000.00	3.873.250.043.00	4.538.250.043.00	1.038.250.043.00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik			4.000.000.000.00	BADAN PENANGGU LANGKAN BENCANA DAERAH				
1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	195.000.000.00	231.480.000.00	231.480.000.00	36.480.000.00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik			230.000.000.00	BADAN PENANGGU LANGKAN BENCANA DAERAH				
1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.500.000.00	7.811.000.00	7.811.000.00	-689.000.00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik			9.000.000.00	BADAN PENANGGU LANGKAN BENCANA DAERAH				
1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan nSemesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	7.000.000.00	6.516.600.00	6.516.600.00	-483.400.00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik			8.000.000.00	BADAN PENANGGU LANGKAN BENCANA DAERAH				
1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																								

SKPD RI : dibuat pada 2024-12-30 10:23:44

Halaman 1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		RKPD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	APBD 2024							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	6.449.000,00	6.449.000,00	-51.000,00	Kab. Barito Ulu, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik			7.000.000,00	BADAN PENANGGU LAGIAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	251.406.350,00	251.406.350,00	251.406.350,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik	-		110.000.000,00	BADAN PENANGGU LAGIAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				-	2 Dokumen	0,00	101.406.500,00	101.406.500,00	101.406.500,00	Kab. Barito Ulu, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik			110.000.000,00	BADAN PENANGGU LAGIAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	0 Laporan	0,00	149.999.850,00	149.999.850,00	149.999.850,00	Kab. Barito Ulu, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik			0,00	BADAN PENANGGU LAGIAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertelaksananya Administrasi Kepegawaian				-	100 %	400.000.000,00	407.210.000,00	407.210.000,00	7.210.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik	-		500.000.000,00	BADAN PENANGGU LAGIAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Barito Ulu, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik			250.000.000,00	BADAN PENANGGU LAGIAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				22 Orang	22 Orang	200.000.000,00	207.210.000,00	207.210.000,00	7.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik			250.000.000,00	BADAN PENANGGU LAGIAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertelaksananya Administrasi Umum Kantor				-	100 %	602.000.000,00	486.936.650,00	486.936.650,00	-115.063.350,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik	-		608.500.000,00	BADAN PENANGGU LAGIAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	43.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik			8.000.000,00	BADAN PENANGGU LAGIAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	350.000.000,00	50.016.650,00	50.016.650,00	-299.983.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik			325.000.000,00	BADAN PENANGGU LAGIAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik			35.000.000,00	BADAN PENANGGU LAGIAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik			35.000.000,00	BADAN PENANGGU LAGIAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penunjang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penunjang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik			5.500.000,00	BADAN PENANGGU LAGIAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTISTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTISTRA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTISTRA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUJAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	180.000.000,00	241.920.000,00	241.920.000,00	61.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bak Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bak			200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGKAM BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-		3.500.000.000,00	3.490.510.000,00	3.490.510.000,00	-9.490.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bak Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bak	-		3.500.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGKAM BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																					
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bak Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bak			0,00	BADAN PENANGGU LANGKAM BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3.000.000.000,00	3.490.510.000,00	3.490.510.000,00	490.510.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bak Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bak			3.500.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGKAM BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor				-	100 %	2.777.500.000,00	2.700.111.632,00	2.955.103.632,00	177.603.632,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bak Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bak	-		2.848.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGKAM BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat																					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	50 Laporan	7.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bak Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bak			8.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGKAM BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	470.000.000,00	343.180.132,00	563.180.132,00	93.180.132,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bak Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bak			490.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGKAM BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.300.000.000,00	2.344.931.500,00	2.378.923.500,00	79.923.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bak Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bak			2.350.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGKAM BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkelaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				-	100 %	1.030.500.000,00	1.047.498.000,00	1.047.498.000,00	16.998.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bak Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bak	-		1.100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGKAM BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				50 Unit	50 Unit	830.500.000,00	847.370.000,00	847.370.000,00	16.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bak Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bak			850.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGKAM BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	200.128.000,00	200.128.000,00	128.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bak Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bak			250.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGKAM BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	0,00	109.344.000,00	109.344.000,00	109.344.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bak Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bak	-		55.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGKAM BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																					
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				-	1 Dokumen	0,00	109.344.000,00	109.344.000,00	109.344.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bak Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Yang Bak			55.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGKAM BENCANA DAERAH	
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa Tangguh Bencana Persentase Logistik Persentase Unsur PB dan Kebakaran				-	100 1 2 % Tahun Dokumen	7.095.771.539,00	4.672.965.725,00	4.672.965.725,00	-269.706.039,00							6.826.065.500,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REINJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REINJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.05.03.2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tertarikannya Informasi Tentang Rawan Bencana				-	100 %	860.000.000,00	553.999.725,00	553.999.725,00	-306.000.275,00			-	Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup	-		870.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.01.0004		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				2500 Orang	2500 Orang	860.000.000,00	553.999.725,00	553.999.725,00	-306.000.275,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel. Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup			870.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tertarikannya Tindakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				-	100 %	1.408.800.000,00	1.508.732.650,00	1.508.732.650,00	99.932.650,00			-	Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup	-		1.113.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.02.0013		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyediaan alat darurat bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangan				-	200 Kegiatan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel. Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.02.0014		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/layak				2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	22.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel. Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup			83.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.02.0016		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				40 Kawasan	40 Kawasan	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel. Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN DAN A REBOISASI (DR)	-	Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.02.0016		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				-	27 Kawasan	0,00	159.000.000,00	159.000.000,00	159.000.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel. Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup			165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.02.0017		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusattdp) dengan Muktamat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				0 laporan	0 laporan	748.800.000,00	1.167.732.650,00	1.167.732.650,00	418.932.650,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel. Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup			755.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tertarikannya Tindakan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				-	100 %	3.259.198.039,00	1.800.264.200,00	1.800.264.200,00	-1.458.933.839,00			-	Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup	-		3.340.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.03.0002		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan DPOKD yang Dihasilkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	169.647.000,00	295.269.675,00	295.269.675,00	125.622.675,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel. Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup			180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.03.0003		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				12 Orang	10 Orang	139.549.750,00	65.761.750,00	65.761.750,00	-73.788.000,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel. Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup			145.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.03.0009		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				392 Orang	392 Orang	100.001.289,00	299.171.875,00	299.171.875,00	199.170.586,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel. Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup			115.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.03.0011		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota				3 Laporan	2 Laporan	2.850.000.000,00	1.140.060.900,00	1.140.060.900,00	-1.709.939.100,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel. Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup			2.900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tertarikannya Sistem Informasi Kebencanaan				-	100 %	1.567.773.500,00	809.969.150,00	809.969.150,00	-757.804.350,00			-	Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup	-		1.503.065.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.04.0004		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	204.999.500,00	204.999.500,00	144.999.500,00	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel. Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup			87.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.04.0008		Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSITRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengalasan Kebutuhan Pascabencana (LITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RSP)				10 Orang	0 Orang	91.708.000,00	0,00	0,00	-91.708.000,00	Kab. Baito Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel Desa	-	-	Sosial, Budaya, Periwisata dan Lingkungan Hidup Sosial, Budaya, Periwisata dan Lingkungan Hidup			0,00	BADAN PENANGGU LAGIAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0098		Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengalasan Kebutuhan Pascabencana (LITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RSP)				-	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Baito Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel Desa	-	-	Sosial, Budaya, Periwisata dan Lingkungan Hidup Sosial, Budaya, Periwisata dan Lingkungan Hidup			0,00	BADAN PENANGGU LAGIAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0010		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota					0 Kegiatan	0 Kegiatan	91.708.000,00	383.000.000,00	383.000.000,00	291.292.000,00	Kab. Baito Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL	-	Sosial, Budaya, Periwisata dan Lingkungan Hidup Sosial, Budaya, Periwisata dan Lingkungan Hidup			91.708.000,00	BADAN PENANGGU LAGIAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0011		Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal				-	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Baito Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel Desa	-	-	Sosial, Budaya, Periwisata dan Lingkungan Hidup Sosial, Budaya, Periwisata dan Lingkungan Hidup			0,00	BADAN PENANGGU LAGIAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0013		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (LITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RSP) Kab/Kota					2 Dokumen	2 Dokumen	1.324.357.500,00	221.969.650,00	221.969.650,00	-1.102.387.850,00	Kab. Baito Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL	-	Sosial, Budaya, Periwisata dan Lingkungan Hidup Sosial, Budaya, Periwisata dan Lingkungan Hidup			1.324.357.500,00	BADAN PENANGGU LAGIAN BENCANA DAERAH
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-				-	-	421.622.500,00	61.785.400,00	61.785.400,00	0,00							421.622.500,00	
1.05.04.2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	-				-	-	421.622.500,00	61.785.400,00	61.785.400,00	-359.837.100,00			-	-			421.622.500,00	BADAN PENANGGU LAGIAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.03.0001		Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengulan Penyebab Kejadian Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kegiatan Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Melalui Penelitian dan Pengulan				100 Dokumen	100 Dokumen	421.622.500,00	61.785.400,00	61.785.400,00	-359.837.100,00	Kab. Baito Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL	-	-			421.622.500,00	BADAN PENANGGU LAGIAN BENCANA DAERAH
			J U M L A H						19.579.394.039,00	17.444.770.000,00	18.364.762.000,00	-1.214.632.039,00							20.260.688.000,00	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 meruakan salah satu dokumen yang di gunakan untuk melihat kinerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Program, Kegiatan serta Anggaran yang telah diserap maupun yang diprediksi digunakan pada tahun berikutnya.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Penanggulanagan Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Dimasa mendatang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Utara juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 untuk tahun berikutnya. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 akan dijadikan bahan perbaikan lebih lanjut untuk penyempurnaan perencanaan hingga evaluasi program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Muara Teweh, 07 Oktober 2024

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA**



SIMAMORATURAHMAN, SE, MS

Pembina (IV/a)

NIP. 19740922 199603 1 001